

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ATRIA VANNESTY

2010012111176

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 33/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 33/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Atria Vanesty
NPM : 2010012111176
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan Anggaran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera
Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H (Pembimbing)



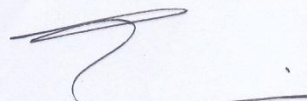
Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H.)

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Atria Vannesty¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail : atriavannesty@gmail.com

ABSTRAK

Good Regional Financial Management can improve the financial performance of a local government Regional financial management includes the use of budgets which is the official who holds the authority to use the budget to carry out the duties. Problem formulation: 1) How is the Implementation of Budget Use in the Regional Disaster Management Agency of West Sumatra Province Based on Regional Regulation of West Sumatra Province Number 4 of 2022 concerning Regional Financial Management? 2) What are the obstacles faced by the Regional Disaster Management Agency of West Sumatra Province in the implementation of budget use? 3) What are the efforts made by the Regional Disaster Management Agency of West Sumatra ? . The type of research used is Sociological Juridical. Data collection techniques through interviews and document studies. The data is analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The budget funds of the Regional Disaster Management Agency of West Sumatra Province that were realized did not experience a deficit 2) Constraints on the use of the West Sumatra Province BPBD budget, namely the budget that was late down from the West Sumatra Provincial APBD.3) Efforts made by BPBD West Sumatra Province with careful budget planning, Financial Supervision and Control

Keywords: budget, Regional Board For Disaster Management, Regional Financial Management

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun

Dalam Pengelolaan Keuangan Penyalahgunaan Anggaran, yang diatur dalam

Pasal 1 Angka 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu penggunaan anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat yang dipimpinnya.

Penggunaan anggaran yang dilaksanakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Sumatera Barat terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, di Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) antara lain di BPBD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat ditemukan bahwa Anggaran dana dari APBD sangat memperhatikan dikarenakan kurang tegas dan tidak cepat dalam alokasi dana ke BPBD Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, banyaknya program penting yang tidak bisa dijalankan

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi BPBD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

3. Apa Saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pelaksanaan Dalam Penggunaan Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi BPBD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara
4. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggunaan Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan penggunaan anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022, dana anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan yang direalisasikan tidak mengalami defisit atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya, sehingga BPBD Provinsi Sumatera Barat tidak kesulitan dana untuk menjalankan rancangan penggunaan anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BPBD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendala yang dihadapi BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Penggunaan Anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran yang terlambat turun
2. Dana anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat hanya dapat

mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pada Tahun sebelumnya

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Upaya yang dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat terhadap kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran tersebut adalah:

1. Perencanaan Anggaran yang Matang
2. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan
3. Transparansi dan Akuntabilitas

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penggunaan anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022, dana anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan yang direalisasikan tidak mengalami defisit atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya, sehingga BPBD Provinsi Sumatera Barat tidak kesulitan dana untuk menjalankan rancangan penggunaan anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu anggaran yang terlambat turun dan Dana

anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat hanya dapat mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pada Tahun sebelumnya

3. Upaya-upaya yang dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penggunaan anggaran yaitu: melakukan Perencanaan Anggaran yang Matang, Pengawasan dan Pengendalian Keuangan, Transparansi dan Akuntabilitas

B. Saran

1. Agar BPBD Provinsi Sumatera Barat bisa koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai
2. Agar adanya ketersediaan dana yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat
3. Agar BPBD Provinsi Sumatera Barat bisa memanfaatkan sumber pendapatan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sakti Ramdhon Syah R, 2020, *Perundang-Undangan Indonesia*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Sumber Lainnya

Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H sebagai dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M.Hum, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Ariszal S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Desmal Fajri S.Ag., M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu